

ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA PUSKESMAS SUNGSANG

Ira¹⁾, Citra Indah Merina²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma

Email: iraayuandira4@gmail.com

Abstract

BLU/BLUD is a reporting entity because it is a service work unit which, although not in the form of a legal entity, manages the separated stated or regional assets. According to PSAP No. 13 the specific purpose of BLU/BLUD financial reporting is to present information that is useful for decision making and to demonstrate the accountability of the entity. The object of research is puskesmas in sungsang village, Banyuasin district, South Sumatera, the type of research is qualittive.

Keywords: PSAP No. 13, Financial Statements

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi pada sekarang ini, menuntut sebuah pemerintahan yang baik melalui system tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu dengan cara menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara.

Terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban APBN membawa bangsa Indonesia ke era reformasi keuangan negara.

Badan Layanan Umum ialah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Berdasarkan dari keputusan pemerintah status rumah sakit milik pemerintah menjadi Badan Layanan Umum supaya pelayanan yang diberikan rumah sakit dapat diberikan secara maksimal.

Puskesmas yaitu satuan kerja BLU yang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan penyusunan Laporan Keuangan sesuai PSAP No. 13 yang ditetapkan dalam PMK Nomor 217/PMK.05/2015. Didalam ketentuan tersebut ditetapkan bahwa Laporan Keuangan sesuai PSAP No. 13 wajib dilaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016.

Dalam proses Penerapan PSAP No.13 pada Puskesmas tidak lepas dari peran yang ada didalam lingkup Puskesmas tersebut. sarana prasarana, sistem informasi, komitmen serta sumber daya manusia menjadi penunjang untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam proses Penerapan PSAP No. 13 tersebut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi bahwa Laporan Keuangan pada Puskesmas Sungsang masih menggunakan basis kas dalam menyusun Laporan Keuangannya Sebagai entitas akuntansi Puskesmas menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan PSAP No. 13 tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Pengelolaan keuangan BLU menyelenggarakan akuntansi dan Laporan Keuangan berbasis akrual.

Puskesmas Sungsang merupakan satu-satunya pelayanan kesehatan yang ada di Desa Sungsang Kabupaten Banyuwangi. Penulis memilih untuk menganalisis laporan ini karena terdapat pelayanan rawat inap bagi pasien bersalin. Faktor pendorong lain yaitu adanya pelayanan berupa BPJS gratis untuk seluruh lapisan masyarakat terutama untuk masyarakat kalangan menengah kebawah. Biaya kesehatan yang cenderung meningkat menuntut Puskesmas untuk secara mandiri mengatasi permasalahan yang ada.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep *New Public Management* (NPM)

Perubahan pola manajemen sektor publik ini dikenal dengan sebutan *New Public Management* (NPM). Konsep *New Public Management* yang telah diimplementasikan diberbagai negara maju, terutama di Eropa dan Amerika, memberi dampak yang luas terhadap tata kelola pemerintahan di berbagai negara. Dalam konsep ini, pemerintah diarahkan untuk meninggalkan paradigma lama seperti administrasi tradisional yang cenderung mengedepankan sistem dan prosedur, birokratis, pemberian layanan yang tidak efektif dan efisien, agar digantikan dengan paradigma baru yang lebih berorientasi pada kinerja dan hasil. Pemerintah dianjurkan untuk melepaskan diri dari birokrasi klasik, dengan mendorong organisasi dan pegawai agar lebih fleksibel, dan menetapkan tujuan, serta target organisasi secara lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil.

Penerapan konsep NPM ini mendasari terbentuknya Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diperbaharui dengan PP Nomor 74 Tahun 2012, yang kemudian disempurnakan dengan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU.

Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP Berbasis Akruwal adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur pada basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi tersebut dikenal dengan istilah kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Secara umum basis kas pada akuntansi telah lama ditinggalkan oleh para penyelenggara laporan akuntansi dan telah beralih ke basis akrual.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 13

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum bertujuan untuk melakukan penyederhanaan dalam pelaporan keuangan instansi BLU/BLUD. Menurut PSAP No. 13, Badan Layanan Umum /Daerah (BLU/BLUD) adalah instansi dilingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU/BLUD ialah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Negara atau daerah yang dipisahkan. Menurut PSAP No.13, tujuan pelaporan keuangan BLU/BLUD secara spesifik adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas. Komponen-komponen laporan keuangan BLU/BLUD terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran BLU/BLUD dapat menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca digambarkan pada posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas BLU/BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU/BLUD.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan dalam rincian dan penjelasan lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Instansi Badan Layanan Umum

1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu terdapat unit kerja atau SKPD pemerintah daerah yang paling banyak diubah statusnya menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).

2) Puskesmas

Puskesmas adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

3) Taman Rekreasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang keparawisataan disebutkan bahwa parawisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

4) Universitas

Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik

dalam berbagai bidang. Sebuah universitas menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana. Universitas dalam pendidikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademik, institut, politeknik, dan sekolah tinggi.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Puskesmas Desa Sungsang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif yang merupakan penelitian dengan melihat masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan keadaan saat ini dari objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015) analisis deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis atau menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih dan mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum, kemudian dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada.

4. HASIL ANALISIS

Profil Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin

Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin terletak di Jl. Eka Jaya, Sungsang I, Kec. Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30971. Mempunyai area kerja satu desa yaitu Sungsang I, meliputi 20 padukuhan, 95 RW dan 297 RT. Desa Caturtunggal memiliki luas area adalah 889.7480 Ha.

Batas wilayah area bila dijabarkan adalah sebagai berikut :

Utara	: Kecamatan Banyuasin II
Selatan	: Kelurahan Muara Telang
Barat	: Kecamatan Pulau Rimau
Timur	: Tanjung Api-Api

Berikut juga diinformasikan jarak antara pemerintah Kecamatan Banyuasin II dengan:

Desa	: 3 Km
Ibu Kota Kabupaten	: 13 Km
Ibu Kota Provinsi	: 12 Km

Jumlah penduduk dan kepala keluarga di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin sebagai berikut:

Jumlah KK	: 20.129 KK
Jumlah Penduduk	: 68.375 jiwa
Total penduduk pria	: 35.500 jiwa
Total penduduk wanita	: 20.129 jiwa

Aktivitas Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin sebagai berikut:

1. Pelayanan BP.Gigi
1. Pelayanan BP.Umum
2. Pelayanan Gizi
3. Pelayanan Laboratorium
4. Pelayanan Konsultasi Sanitasi

Berikut diinformasikan nama pejabat manajer dan Pengawas BLUD :

Pemimpin BLUD	: Toto Soeharto, SKM, M.Kes.
Pejabat Keuangan	: Sri Suhartati
Pelaksana Teknis	: Drg. Retno Hari R.M
Bendahara Pengeluaran	: Agnes Yuyan
Bendahara Penerima	: Sri Partiningsih
Sekretaris Daerah	: Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc
Kepala DPKAD	: Bambang Irawan, S.E, M.M, Ak, CA.
Asisten Sekda Pemerintah	: Soenarya, SH
Pegawai Sekda Bidang Pembangunan :	
Pegawai Sekda Bidang Administrasi	: Joko Handoyo, SH
Staff Pakar Bupati Bidang SDM	: Ir. Zulkifli Idrus, M.Tp
Staff Pakar Bupati Ekonomi	: Suyono, SH
Kepala Bappeda Kab.Banyuasin	: Drg. Intriati Y. M.Kes.
Kepala BKD	: Drg. Iswoyo Hadiwarno

Laporan Keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin

Berdasarkan Permendagri No.61 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, setiap BLUD diwajibkan membuat Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD harus menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Neraca

Berdasarkan PSAP No.13 puskesmas harus menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang dikecualikan untuk entitas khusus yang diatur di dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. i Pemaparan Neraca Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin, aset lancar telah dipisahkan dengan aset tidak lancar. Aset lancar antara lain berbentuk kas atau setara kas, dan sediaan. Di aset tidak lancar meliputi mesin dan peralatan, bangunan dan gedung, jaringan, jalan dan irigasi. Dalam mencatat kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Di Pemaparan Neraca Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin, aset lancar telah dipisahkan dengan aset tidak lancar. Aset lancar antara lain berbentuk kas atau setara kas, dan sediaan. Di aset tidak lancar meliputi mesin dan peralatan, bangunan dan gedung, jaringan, jalan dan irigasi. Dalam mencatat kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek contohnya berbentuk uang persediaan dari anggaran kabupaten. Untuk penyataan modal dikelompokkan menjadi modal terikat dan modal tidak terikat.

Berdasarkan neraca yang dinyatakan dalam Laporan Keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin Tahun 2018 hanya terdapat 6 akun yaitu: aset keuangan, aset tetap, kas dan setara kas, persediaan, total aset yang diklasifikasikan, dan utang dagang. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin untuk Neraca adalah $6/17 \times 100\% = 35,29\%$.

Penyajian Laporan Operasional

Berdasarkan pada PSAP No.13 Laporan Laba Rugi secara minimum harus mencakup akun-

akun berikut: pendapatan, laba rugi usaha, beban pajak, persediaan, dll. Terdapat 2 metode perusahaan dalam memaparkan Laporan Laba Rugi yaitu menggunakan metode beban fungsional dan metode sifat beban. Pada pemaparan akun yang ada di dalam Laporan Operasional Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin telah sama dengan PSAP No. 13 diantaranya terdapat: total biaya, total pendapatan, total kekurangan dan kelebihan dalam suatu tahun.

Pemaparan Laporan Operasional yang diakui sebagai pendapatan diantaranya hibah tidak terikat, pendapatan jasa layanan, APBN, dan APBD. Pada pos biaya yang diakui antara lain ialah biaya pelayanan (biaya barang dan jasa, biaya bahan, biaya pegawai, biaya jasa pelayanan, dan biaya pemeliharaan,) dan biaya operasional (biaya administrasi kantor, biaya pegawai, biaya barang dan jasa, biaya pemeliharaan,, dll). Pada pemaparan Laporan Operasional memakai metode sifat beban, dimana biaya dipaparkan sesuai dengan sifatnya. Pada pemaparan akun yang ada di dalam Laporan Operasional Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin telah sama dengan PSAP No. 13 diantaranya terdapat: total biaya, total pendapatan, total kekurangan dan kelebihan dalam suatu tahun.

Penyajian Laporan Arus Kas

Berdasarkan tabel 6, sudah dipaparkan bahwa Laporan Arus Kas yang dipaparkan oleh Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin memiliki tingkat kesesuaian sebesar 100% dengan PSAP No.13 karena menurut PSAP No.13 Laporan Arus Kas wajib bisa memaparkan dasar bagi pengguna Laporan Keuangan untuk menilai tingkat kesanggupan puskesmas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan puskesmas dalam menggunakan kas tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian Laporan Keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin untuk Laporan Arus Kas adalah 100% dikarenakan sudah menyanggupi regulasi yang ada pada PSAP No.13 bahkan memiliki kelengkapan yang lebih dari yang disyaratkan PSAP No.13 dengan menyatakan arus kas dari kegiatan operasi dan arus kas dari aktivitas investasi sesuai yang disebutkan oleh PSAK No.2.

Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel telah dinyatakan tentang Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin memiliki tingkat kesesuaian sebesar 100% dikarenakan mampu memaparkan keterangan tentang dasar penyusunan Laporan Keuangan dan regulasi akuntansi yang dipakai oleh Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin, mampu menyatakan informasi yang disebutkan oleh SAK yang tidak dipaparkan di dalam bagian Laporan Keuangan, dan menyatakan keterangan yang belum dipaparkan di Laporan Keuangan tetapi keterangan tersebut relevan untuk memahami Laporan Keuangan.

Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin berdasarkan keseluruhan sudah mengimplementasikan PSAP No.13 mulai dari penerapan Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara keseluruhan sudah sesuai seperti yang diterapkan pada PSAP No.13 dan tak ada perbedaan yang mendasar. Berdasarkan PSAP No.13 susunan Laporan Keuangan yang komplit meliputi; Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan posisi keuangan (neraca pada akhir periode), Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas.

laporan keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin berdasarkan keseluruhan sudah mengimplementasikan PSAP No.13 mulai dari penerapan Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara keseluruhan sudah sesuai seperti yang diterapkan pada PSAP No.13 dan tak ada perbedaan yang mendasar. Berdasarkan PSAP No.13 susunan Laporan Keuangan yang komplit meliputi; Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan posisi keuangan (neraca pada akhir periode), Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan dan Laporan Arus Kas. Di Pemaparan Laporan Keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin terdapat perubahan nama

dimana Laporan Laba Rugi Komprehensif diganti nama menjadi Laporan Operasional, hal ini disebabkan karena Puskesmas bukanlah merupakan organisasi yang tidak mencari profit dan tidak menganut sistem rugi laba. Pada Laporan Perubahan Modal pada pemaparan Laporan Keuangan di Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin tak disusun, karena semua modal yang dimiliki Puskesmas adalah milik pemerintah daerah.

Penerapan PSAP No.13 dalam Pelaporan Keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) berbasis akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Umum terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016. Sebelum diterbitkannya PMK ini, standar penyajian laporan keuangan BLU hanya mengacu sedikit pada PSAP nomor 11 tentang akuntansi laporan keuangan konsolidasian. Manfaat dari peraturan ini ialah mengatur pemaparan laporan keuangan BLU dalam rangka *upgrade* perbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar BLU.

Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLU yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan BLU adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dalam PSAP 13 yakni terdiri dari :

1. Laporan Kenyataan Anggaran
Laporan Kenyataan Anggaran BLU memaparkan keterangan pernyataan pendapatan LKA, belanja, surplus/defisit-LKA, pembiayaan, dan sisa kurang/lebih pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memaparkan keterangan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pelaporan mengenai kewajiban, aset, dan ekuitas pada periode tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas memaparkan keterangan penurunan atau kenaikan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan keuangan badan layanan umum akan dikombinasikan ke dalam laporan keuangan perusahaan akuntansi/entitas pelaporan. Laporan Kenyataan Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLU dikombinasikan pada laporan keuangan perusahaan akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.

Berdasarkan dengan Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 116 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: BLUD

menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.

5. SIMPULAN

Sesuai dengan penelitian dan penjabaran dapat ditarik kesimpulan bahwa Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin sudah bisa mengimplementasikan PSAP No.13 dalam Penyajian Laporan Keuangan yang berupa Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan meskipun ada beberapa perbedaan dalam penyajian Laporan Keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin dengan PSAP No.13 yaitu tak mempunyainya Laporan Perubahan Ekuitas disebabkan seluruh modal yang ada pada Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin merupakan milik Pemerintah Daerah setempat. Juga terdapat perubahan nama pada Laporan Laba Rugi Komprehensif menjadi Laporan Operasional, walaupun terdapat perbedaan nama tetapi keterangan yang disajikan Laporan Operasional secara keseluruhan sudah memaparkan informasi tentang pendapatan, biaya, dan jumlah kekurangan dan kelebihan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin, dengan detail sebagai berikut:

1. Penyajian Neraca Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin telah sesuai dengan PSAP No. 13 sebesar 35,29%.
2. Penyajian informasi pada Catatan Atas Laporan Keuangan Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin telah sesuai dengan PSAP No. 13 sebesar 100%.
3. Penyajian Laporan Operasional Puskesmas Desa Sungsang Banyuasin telah sesuai dengan PSAP No. 13 sebesar 60%.

6. REFERENSI

- [1] Fahmi,Irham. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: Alfabeta.
- [2] Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [3] Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV.Andi Offset
- [4] Marshallino. (2015). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [5] Munawir. (2004). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Ke-4*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Nur Indriantoro & Bambang Supomo. (2002). *Metode Penelitian Bisnis Untuk: Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- [7] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- [9] Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
- [10] Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009). 2009. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- [11] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- [12] Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015.
- [13] Ronny Hendrawan. (2011). “Analisis Penerapan PSAK No.45 Tentang PelaporanKeuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus

- [14] Rulam Ahmadi. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- [15] Sofyan Harahap. (2006). *Analisis Kritis Laporan Keuangan Edisi 1-5*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- [16] Siti Hawa dan Siti Khairani. (2013). Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Laporan Keuangan PT.Jamsostek (Persero). *Jurnal*. STIE MDP.
- [17] Siti Rahmi Amir dan Treesje Runtu. (2014). “Analisis Penerapan PSAK tentang Penyajian Laporan Keuangan pada PT.Bank Sulut TBK (Persero)”. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [18] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- [19] Wahyu Repi, Grace B. Mogi-Nangoi, Heince Mokus. (2015). “Analisis Penerapan PSAK No.45 (Revisi 2011) Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada STIKES Muhammadiyah Manado”. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado.